
EFEKTIFITAS PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN *COMMUNITY GOVERNANCE* DI KELURAHAN KEDUNG COWEK KECAMATAN BULAK KOTA SURABAYA

Devvy Putri
devvyputri@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Abstract

This study aimed to describe about the effectiveness about Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) in achieving community governance in sub-district Kedung Cowek, Bulak, Surabaya. The background of the study is that the sub-district is an of first priority area in developing the quality of housing and habitation, exactly in Kedung Cowek that has a high level of the dirt. For ending up this problem, since 2015, Surabaya government, through the Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelurahan Kedung Cowek did Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).

In analyzing about the effectiveness, this study used theory from Ripley for measuring the level of success in achieving the goals that had already been set up which is used access coverage, bias, accountability, and program suitability with the needs and in achieving community governance, the writer used 2 principles from Clarke and Stewart. Method that had been used is qualitative method with descriptive research type.

The result of this research showed that from five aspects to score the implementation result of PLPBK Program, there were only four effective aspects in its implementation namely access, coverage, bias, and accountability. One of those aspects which had not been optimal was program suitability to the needs. After that, according to the result, there was a community government process in PLBK by looking at the principles that have to be done swadaya group's society (KSM) such as 1) Community has to able to give a service well for the prosperity of the communities' society area 2) Community's role in the community governance just to wncourage the society surrounds the area.

Key words: Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), Community Governance, Evaluation Program, Effectiveness, Slums.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman, penduduk di seluruh dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Termasuk penduduk di Indonesia. Manusia memiliki keturunan hingga turun menurun merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Namun, tanpa kita sadari memiliki keturunan dalam jumlah yang banyak dapat menjadi ancaman berat bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Indonesia sebagai Negara berkembang yang memiliki penduduk yang cukup padat, tidak bisa dipungkiri meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai solusi yang telah ditawarkan kepada masyarakat namun tetap saja laju pertumbuhan penduduk tidak bisa dihindarkan.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya bisa memberikan dampak positif, diantaranya dapat menjadikan usaha untuk meningkatkan hasil produksi dan mengembangkan ekonomi dengan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi,

khususnya yang terjadi di Indonesia tidak bisa hanya berdampak positif saja, namun ada sisi negatifnya ialah menimbulkan dampak negatif di berbagai bidang yang tentunya akan saling mempengaruhi satu sama lain. Dampak ini timbul apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung keberlangsungan penduduk yang bersangkutan demi memperoleh kehidupan yang sejahtera. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia masih di dominasi oleh daerah tertentu saja atau berpusat pada satu daerah saja, tidak tersebar secara merata ke semua daerah yang ada di Indonesia, hal ini bisa dilihat pada kepadatan penduduk di beberapa provinsi Indonesia.

Tabel 1.1
Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi
2014-2015

No	Provinsi	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)		
		2013	2014	2015
1	Lampung	229	232	234
2	Kepulauan Riau	69	71	73
3	NTB	254	257	260
4	Bali	702	710	718
5	Jawa Timur	803	808	813
6	Jawa Tengah	1014	1022	1030
7	D.I Yogyakarta	1147	1161	1174
8	Banten	1185	1211	1237
9	Jawa Barat	1282	1301	1320
10	DKI Jakarta	15015	15173	15328
	Indonesia	130	132	134

Sumber: Diolah Badan Pusat Statistik Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat 10 Provinsi di Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Pulau Jawa menempati urutan teratas dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa persebaran penduduk seluruh provinsi di Indonesia belum merata. Dibuktikan dengan pusat persebaran penduduk di Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota menjadi pusat perkembangan bisnis di Indonesia menjadikan Pulau Jawa ini lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Indonesia tidak sebanding dengan persebaran penduduk di daerah lainnya. Terlihat pada tabel diatas penduduk daerah Lampung, Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah dibandingkan DKI Jakarta. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah belum melaksanakan pembangunan secara merata ke semua pulau atau daerah- daerah terpencil lainnya.

Dengan fenomena yang terjadi di masyarakat angka kelahiran di masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya menjadi suatu tantangan bagi pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Permasalahan jumlah penduduk yang semakin meningkat, tidak dapat dihindarkan. Terkait masalah meningkatnya penduduk di Indonesia, juga berimbas dalam penyediaan lapangan pekerjaan di perkotaan. Kecenderungan pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan, perlu mendapatkan perhatian semua pihak, yang harus diperhatikan adalah pertama, kecenderungan pertumbuhan penduduk di perkotaan dikhawatirkan menimbulkan ledakan kemiskinan di wilayah perkotaan. Kedua, kawasan padat penduduk di

perkotaan dikhawatirkan dapat menyuburkan kriminalitas. Hal ini disebabkan terjadinya urbanisasi (*migration growth*) dan pertumbuhan penduduk alami (*natural growth*). Pada kenyataannya lapangan pekerjaan yang tersedia di perkotaan tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Tingkat urbanisasi yang tinggi menjadikan perkotaan padat penduduk. Belum lagi lapangan pekerjaan yang semakin banyak peminatnya. Mengakibatkan para pencari kerja sedikit kecewa karena banyaknya pesaing yang ingin memperoleh pekerjaan. Banyak sekali para penduduk Desa yang mengadu nasib mencari pekerjaan ke Kota. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi juga berimbas pada peningkatan permintaan kebutuhan tempat tinggal atau pemukiman. Permintaan kebutuhan akan tempat tinggal juga menjadi persoalan penting pada ketersediaan lahan bagi pembangunan rumah di perkotaan. Kondisi seperti ini yang menyebabkan keterbatasan lahan bagi penyediaan tempat tinggal untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena, semakin meningkatnya harga jual rumah di kawasan perkotaan. Semakin tingginya harga jual rumah menjadikan penduduk berpenghasilan rendah belum mampu untuk membeli rumah di perkotaan. Hal ini memicu munculnya kawasan-kawasan pemukiman yang tidak tertata dengan baik sehingga kawasan tersebut menjadi kumuh. Usaha pemerintah untuk mencegah berdirinya permukiman kumuh masih belum maksimal, dikarenakan sudah banyak petugas yang berwenang untuk mengatur kawasan tersebut, tetapi akan ada lagi bangunan-bangunan liar baru yang berpindah ke kawasan lainnya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat yang masih membangun rumah di pinggir kota. Oleh sebab itu pemerintah harus mencari solusi terkait ketersediaan lahan kawasan permukiman yang bisa di jangkau oleh masyarakat menengah kebawah.

Kondisi ini semakin di perburuk dengan sulit terjangkaunya penyediaan sarana dan prasarana Kota. Fenomena ini banyak ditemukan pada permukiman kumuh yang didirikan dilahan illegal, seperti bantaran sungai atau di pinggir rel kereta api. Infrastruktur yang paling banyak menjadi masalah adalah drainase serta sanitasi persampahan. Akibat tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Bulak, kualitas permukiman serta daya dukung lingkungan menurun. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya kualitas air sumur dan sumber air lainnya. Selain itu terbatasnya ketersediaan air bersih juga menyebabkan penduduk sekitar terpaksa menggunakan air sungai untuk kegiatan MCK atau membeli air bersih di pedagang eceran.

Persebaran permukiman kumuh di Kota Surabaya hampir merata, namun kawasan utara Kota Surabaya teridentifikasi lebih banyak titik-titik kawasan kumuhnya dibandingkan dengan kawasan kumuh lainnya. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh tim penyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Surabaya tahun 2004, kelurahan-kelurahan yang memiliki kawasan kumuh ada 23

kelurahan yaitu: Ujung, Bulak Banteng, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding, Bulak, Gading, Dupak, Bongtakaran, Sukolilo, Gebang Putih, Medokan Semampir, Keputih, Gununganyar, Rungkut Menanggal, Wiyung, Waru Gunung, Benowo, Moro Krembangan, Romo Kalisari, Sumberejo, Sememi dan Kandangan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Bu Risma agar pembangunan Kota Surabaya semakin sejahtera dengan mengurangi angka kemiskinan. Salah satu penyebab dari kemiskinan Kota Surabaya adalah urbanisasi. Tingkat urbanisasi yang tinggi mengakibatkan pengangguran yang merajalela, banyak penduduk desa berbondong-bondong mencari pekerjaan di Surabaya. Akibatnya banyak bangunan-bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai maupun di rel kereta api, yang di bangun oleh penduduk miskin yang tidak memiliki tempat tinggal di perkotaan. Karena tingginya angka kemiskinan, maka bukan sebagai hal asing lagi bila di Kota Surabaya permukiman kumuh mudah dijumpai di seluruh kawasan Kota Surabaya.

Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan perhatian dalam mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hal tersebut diwujudkan secara menyeluruh dan terpadu antara pembangunan fisik (infrastruktur dan hunian), pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan manusia. Ketiga bidang tersebut merupakan kesatuan yang saling berkaitan dan dikenal sebagai pendekatan TRIDAYA dengan memadukan antara pemberdayaan sosial, ekonomi, dan lingkungan (SEL) secara sinergis. Pendekatan TRIDAYA ini adalah aktualisasi dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan SEL yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah melalui pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang telah berlangsung sejak tahun 1999. Sejak tahun 2007 program tersebut menjadi PNPM Mandiri Perkotaan.

Pada tahap pertama, PNPM Mandiri Perkotaan berorientasi untuk membangun pondasi “masyarakat berdaya” dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Pada tahap berikutnya PNPM Mandiri Perkotaan berorientasi untuk membangun transformasi menuju “masyarakat mandiri” yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli untuk mengakses berbagai peluang dan sumber

daya yang dibutuhkan masyarakat. Pada tahap lanjutan, PNPM Mandiri Perkotaan berorientasi untuk membangun transformasi menuju “masyarakat madani” yang dilakukan melalui intervensi pembelajaran penataan lingkungan permukiman secara menyeluruh berbasis komunitas (PLP-BK).

Rencana Tindak Penataan Lingkungan dan Permukiman (RTPLP) merupakan panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan dengan berpedoman dalam Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencanan Tata Bangunan dan Lingkungan.

Kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman kumuh. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman kumuh yang terwujud. Salah satunya kawasan kumuh menjadi salah satu permasalahan di Kota Surabaya. Permukiman kumuh memiliki kualitas sanitasi yang rendah, yang mengakibatkan rawannya penyakit sehingga penduduk yang tinggal di lingkungan kumuh rawan terserang penyakit dan mereka terbebani biaya kesehatan yang mahal. Mayoritas penduduk yang bertempat tinggal di permukiman kumuh adalah masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Mengakibatkan penduduk yang terserang penyakit tidak bisa berobat karena keterbatasan biaya. Kecamatan Bulak menduduki kawasan prioritas pertama dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman Kawasan kumuh di huni oleh penduduk miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kemampuan ekonominya masi sangat rendah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya harus menemukan solusi yang tepat dalam menangani permasalahan ini.

Dengan latar belakang permasalahan diatas pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) sudah berjalan sejak tahun 2015 di Kelurahan Kedung Cowek Kota Surabaya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait adanya Program PLP-BK. Maka dalam penelitian ini, peneliti melakukan efektifitas program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) dalam mewujudkan *community governance* khususnya pada aspek pelaksanaan dalam pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan atas permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Bagaimana efektifitas Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kecamatan Bulak, Kelurahan Kedung Cowek Surabaya?

2. Bagaimana program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dalam upaya mewujudkan *community governance*?

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan perbandingan dalam rangka penelitian serta pengembangan lebih lanjut tentang riset evaluasi pada suatu program dalam halberfokus pada Efektivitas Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), utamanya dalam permasalahan meluasnya permukiman kumuh di Kota Surabaya dan penelitian ini juga berfokus pada pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dalam mewujudkan *Community Governancedi* Kecamatan Bulak Kelurahan Kedung Cowek Surabaya.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan informasi mengenai efektifitas program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dan pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dalam mewujudkan *Community Governancedi* Kecamatan Bulak Kelurahan Kedung Cowek Surabaya, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan program ke depannya. Sehingga menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait, seperti Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai Fasilitator Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Serta Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) sebagai pelaksana Program Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kelurahan Kedung Cowek. Bisa juga menjadi rujukan bagi pihak swasta yang turut berkolaborasi dalam pelaksanaan Program Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kelurahan Kedung Cowek Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan metode wawancara secara mendalam observasi, dan studi dokumen. Teknik penentuan informan dilakukan dengan *purposive* dimana pihak-pihak dianggap mengetahui terkait pengelolaan data pembangunan kesehatan. Teknik analisis data merujuk pada Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi.

Efektiftas

Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memnuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitaas dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya sautu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnta. Hal ini berarti pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, yang artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas yaitu pencapaian tujuan. Effendy menjelaskan bahwa efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Berdasarkan pengertian efektivitas dari berbagai ahli di atas, dapat diartikan bahwa pengukuran efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengertian efektivitas lainnya menurut Arens dan Loebbecke menyatakan bahwa "*Effectiveness refers to the accomplishment of objective, whereas efficiency refers to the resource used to achieved those objectives*". Pengertian lainnya dikemukakan oleh Sukrisno Agoes yang menyatakan bahwa efektif apabila suatu tujuan, sasaran, program dapat tercapai batas waktu yang ditargetkan, tanpa mempedulikan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan Supriyono menyatakan bahwa organisasi atau unit organisasi dikatakan efektif jika outputnya memberikan sumbangan yang besar terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil informasi terkait dengan kinerja suatu kebijakan diperlukan tipe kriteria keputusan yang digunakan untuk menyarankan pemecahan masalah kebijakan. Dengan kriteria keputusan dimaksudkan secara eksplisit sebagai nilai-nilai yang dinyatakan untuk melakukan riset evaluasi pada suatu kebijakan atau program.

Oleh karena itu, untuk menentukan kriteria dalam penelitian ini berlandaskan pertimbangan menyangkut yang dianggap penting dan menjadi tujuan serta menjadi fokus penelitian ini yaitu pada proses pelaksanaan program Penataan Lingkungan

Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi formal dengan kriteria evaluatif yang digunakan adalah kriteria efektifitas dengan menggunakan aspek:

1. Akses digunakan untuk mengetahui bahwa kebijakan atau program pelayanan yang diberikan oleh pemerintah memiliki kemudahan untuk dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses yang mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Aspek akses ini juga mengandung pengertian bahwa adanya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti halnya: gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses dapat dipahami tidak terjadi diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

Dalam penelitian ini akses diartikan sebagai kemudahan kelompok sasaran dalam mengakses atau mendapatkan manfaat program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).

2. Cakupan digunakan untuk menilai kebijakan atau program tersebut dengan seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan.

Dalam penelitian ini cakupan (*coverage*) diartikan sebagai keterjangkauan fasilitas yang diberikan kepada kelompok sasaran dalam program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).

3. Frekuensi digunakan untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang ditawarkan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin baik pula implementasi kebijakan atau program tersebut. Frekuensi menjadi sangat penting dan relevan ketika digunakan untuk mengetahui keberhasilan kebijakan atau program yang jenisnya tidak hanya diberikan sekali, namun berulang kali.

Frekuensi dalam penelitian kali ini tidak digunakan dikarenakan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) merupakan program yang dilaksanakan sekali dalam suatu wilayah, sehingga kelompok sasaran hanya mendapatkan layanan hanya sekali.

4. Bias digunakan untuk melakukan penilaian apakah dalam pelaksanaan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh implementer terjadi bias (penyimpangan) kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak *eligible* untuk menikmati pelayanan yang seharusnya bukan untuk mereka.

Dalam penelitian ini bias diartikan sebagai penyimpangan kepada target sasaran program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).

5. Ketepatan layanan (*service delivery*) digunakan untuk melakukan penilaian apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai *output* suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Dalam artian bahwa jika terjadi keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut.

Dalam penelitian ini tidak digunakan karena program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) ini tidak memiliki batas waktu untuk menyelesaikan hingga tuntas terkait pelaksanaan program tersebut.

6. Akuntabilitas Akuntabilitas digunakan untuk apakah tindakan para implementor dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelaksana kebijakan atau program kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Jika terdapat pengurangan terhadap hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan sebuah bentuk penyimpangan.

Dalam penelitian ini akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dan pertanggung jawaban pelaksana kepada masyarakat penerima program PLPBK.

7. Kesesuaian program dengan kebutuhan digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran merupakan sesuatu yang dibutuhkan mereka atau tidak.

Dalam penelitian ini aspek kesesuaian program dengan kebutuhan diartikan sebagai kesesuaian program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dengan kebutuhan kelompok sasaran.

Program

Menurut Bintoro Tjockroamidjojo, program adalah suatu aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu yang spesifik dalam ruang dan waktu yang terbatas yang terdiri dari berbagai proyek-proyek yang saling berhubungan dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas. Tjockroamidjojo juga menambahkan mengenai ciri-ciri program yang baik, yaitu (a) tujuan yang dirumuskan harus jelas, (b) penentuan peralatan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut, (c) suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program

seefektif mungkin, (d) pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dalam program tersebut, (e) hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan tidak berdiri sendiri, dan (f) berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk menjelaskan program tersebut.

Sedangkan menurut Pasolong program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka definisi program yang sesuai dengan penelitian ini adalah bentuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berangsur-angsur dari perencanaan suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka panjang.

Community Governance

Model pemerintahan yang baru berkembang mendapatkan popularitas dalam sektor publik yaitu *community governance*. Konsep ini mengacu pada partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan meliputi hal-hal public terkait pemerintahan local, tata kelola sosial, tata kelola jaringan, dan pemerintahan partisipatif.

Menurut Armstrong, Francis, Totikidis, 2005 dalam jurnal *The concept of community governance*, tata kelola komunitas adalah suatu manajemen di tingkat komunitas dan pengambilan komunitas yang dilakukan oleh komunitas yang ada di masyarakat dan kelompok kepentingan masyarakat. Hanya fokus pada komunitas bukan pada korporasi, organisasi, pemerintah daerah atau sektor publik. Oleh karena itu tata kelola pemerintah memiliki pertanyaan khusus tentang sejauh mana anggota komunitas dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu program yang dilaksanakannya.

Tata kelola komunitas memiliki prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan pada komunitas yang ada di masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Clarke dan Stewart (1998) dalam jurnal *The Concept of community governance* yaitu:

1. Komunitas harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada kesejahteraan seluruh masyarakat yang berada di wilayah komunitas tersebut.
2. Komunitas harus menghargai keberadaan organisasi lain yang ikut serta dalam kegiatannya, dan tentunya sesuai kewenangan organisasi tersebut.
3. Peran komunitas dalam *community governance* hanya untuk memberdayakan masyarakat yang berada di dalam komunitas tersebut.

4. Komunitas memastikan bahwa seluruh sumber daya di masyarakat di gunakan sebagai tujuan demi kebaikan di daerahnya.
5. Komunitas setempat perlu meninjau kembali bagaimana cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya agar terpenuhi dengan baik.
6. Komunitas harus menjadi penengah dalam menunjukkan kepemimpinannya agar tidak terjadi konflik dan terciptanya kesepakatan bersama.

Demikian pula Bowles dan Gintis(2002) dalam jurnal *The Concept of community governance* menggunakan istilah *community governance* sebagai “modal sosial” bagi pemerintah dengan memfokuskan perhatiannya pada komunitas masyarakat. Komunitas masyarakat disini sebagai bagian dari tata pemerintahan yang baik karena mereka menangani masalah-masalah tertentu yang tidak dapat ditangani oleh individu yang menanganinya secara individu.

Berdasarkan pendapat para tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa peran *community governance* sangat penting untuk mengelola pengembangan kebijakan yang ada dimasyarakat dan program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Isu permasalahan yang terjadi di masyarakat berhubungan langsung dengan komunitas yang ada di masyarakat. Kekuatan komunitas dalam menyelesaikan berbagai macam masalah yang terjadi dapat memberikan dukungan kepada meningkatnya kapasitas masyarakat dan dapat memberikan umpan balik dari komunitas kepada pemerintah.

Namun pada penelitian ini peneliti hanya mengambil 2 prinsip saja yaitu 1) komunitas harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada kesejahteraan seluruh masyarakat yang berada di wilayah komunitasnya 2) peran komunitas dalam *community governance* hanya untuk memberdayakan masyarakat yang berada di lingkungan komunitas tersebut, karena peneliti ingin melihat seberapa jauh usaha kelompok swadaya masyarakat (KSM) melalui program PLPBK yang dicanangkan oleh pemerintah. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat apakah program tersebut mampu memberikan pelayanan yang baik untuk mensejahterakan masyarakat selain itu peneliti ingin melihat peran kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam memberdayakan masyarakat yang berada di komunitas tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan tentang evaluasi pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dalam Pengembangan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Evaluasi efektivitas program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya.

Dari kelima aspek yang digunakan dalam penilaian mengenai efektifitas kebijakan ada 4 aspek yang bisa dikatakan efektif yaitu:

- a. Akses, karena pada pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kelurahan Kedung Cowek peneliti mengetahui bahwa akses yang diberikan oleh peneliti memiliki kemudahan untuk dijangkau oleh kelompok sasaran. Kemudahan akses ditunjukkan oleh adanya temuan tentang banyaknya KSM yang mendaftarkan lokasi wilayahnya dengan membuat proposal, lalu proposal akan diserahkan oleh pihak KSM kepada BKM/ Kelurahan setempat. Namun hanya beberapa lokasi saja yang diverifikasi, hal ini terjadi karena hanya 2 lokasi sasaran saja di Kelurahan Kedung Cowek ini yang memenuhi syarat yaitu permukiman yang padat, miskin, dan teridentifikasi kekumuhannya. Selain itu, lokasi tersebut dekat dengan pesisir pantai kenjeran, salah satu persyaratan untuk mendapatkan program PLPBK pihak KSM hanya memprioritaskan lokasi pesisir tersebut. Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan program ini juga didasari dari komitmen para pengurus anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan.
- b. Cakupan, karena pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) ini dilihat melalui data pengajuan terkait warga lokasi sasaran yang lingkungannya teridentifikasi kumuh. Dengan adanya persyaratan lokasi sasaran menurut pedoman teknis Program PLPBK yaitu 1) Kelurahan/ desa PNPM Mandiri Perkotaan; 2) BKM/ LKM yang ada di kelurahan desa tersebut, memiliki kinerja pembukuan sekretariat minimal berdaya; 3) kelurahan/ desa memiliki permukiman padat, kumuh dan miskin yang menjadi prioritas Pemda dalam penataan lingkungan permukiman; 4) pemerintah kabupaten/ kota terkait memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK. Seperti halnya lokasi tersebut harus memiliki permukiman yang berkriteria padat, kumuh dan miskin.
- c. Bias, karena dalam pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) pemilihan lokasi sasarnya dilakukan secara musyawarah dalam pertemuan yang diadakan di kelurahan yang dihadiri oleh pengurus RT RW, pengurus BKM dan Kelurahan beserta pemangku kepentingan lainnya sehingga lokasi sasaran ini

diperuntukkan bagi lokasi yang menjadi prioritas program PLPBK. Adanya musyawarah dengan tokoh masyarakat juga akan meminimalisir adanya penyimpangan kepada kelompok lokasi sasaran yang tidak berhak untuk menerima manfaat yang seharusnya bukan diperuntukkan untuk mereka. Jadi, bisa dikatakan tidak ada penyimpangan pada sasaran penerima program.

- d. Akuntabilitas, karena pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dilaksanakan sesuai dengan peran KSM, sehingga dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan kegiatan program dilakukan oleh anggota KSM. Dalam menyalurkan dana bantuan KSM memiliki rekening khusus, untuk pihak BKM langsung mentransfer dana tersebut langsung ke rekening KSM. Adanya peran pendamping program PLPBK juga menjadi salah satu terlaksananya program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) agar pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan tanggung jawab atas pemenuhan hak hak masyarakat juga dilaksanakan oleh KSM dengan membantu penyaluran bantuan yang akan diberikan langsung kepada sasaran program.

Selanjutnya, aspek yang dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), sebagai berikut:

- a. Kesesuaian program dengan kebutuhan, dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), minimnya dana bantuan oleh karena itu, dana tersebut hanya dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi jaringan jalan umum dan pengelolaan sampah saja. Dengan kondisi seperti ini KSM memberikan solusi seperti itu, dengan memprioritaskan jaringan jalan umum dan pengelolaan persampahan untuk dapat meminimalisir pengeluaran dalam pembelian bahan material yang dibutuhkan.

Dari kelima indikator diatas untuk menilai kinerja Program Penataa Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) terdapat empat indikator yang dinilai efektif dalam pelaksanaannya dan satu diantara aspek tersebut tidak berjalan efektif. Karena dalam aspek kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat tidak efektif, sehingga program ini hanya baik dilaksanakan oleh KSM, BKM dan Kelurahan saja, namun bagi masyarakat yang terkena dampak dari manfaat ini, tidak semua pembangunan infrastruktur yang dibenahi namun hanya beberapa saja yang dibenahi, sehingga program ini kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi lokasi sasaran Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

2. Efektifitas program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dalam mewujudkan *community governance* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 2 prinsip dari Clarke dan Stewart yaitu 1) Komunitas harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada kesejahteraan seluruh masyarakat yang berada di wilayah komunitasnya 2) Peran komunitas dalam *community governance* hanya untuk memberdayakan masyarakat yang berada di lingkungan komunitas tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa program PLPBK sudah mewujudkan hal tersebut. Bisa dilihat dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak KSM sebagai pelaksana program PLPBK sudah menjalankan tugasnya sebaik mungkin sesuai dengan hak dan kewenangannya dan peran KSM dalam memberdayakan masyarakatnya untuk turut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan program PLPBK juga sudah dikatakan berhasil walaupun ada beberapa masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan program.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yang merujuk pada kesimpulan diatas, maka saran yang bisa diberikan oleh peneliti dalam pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), yaitu

- 1) Dalam hal efektifitas pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), yaitu dalam Kelompok Keswadayaan Masyarakat yang kekurangan anggota untuk melaksanakan kegiatan di wilayahnya, akibatnya di KSM RW 03 pelaksanaan program PLPBK kegiatannya membutuhkan waktu yang cukup lama, hal tersebut karena sebagian masyarakat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, seharusnya meskipun mempunyai kesibukan masyarakat harus meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan program PLPBK ini. Sehingga kendala tersebut menjadikan program PLPBK tidak berjalan secara maksimal.
- 2) Terkait dengan kesesuaian program dengan kebutuhan sasaran, dalam pendanaan seharusnya lebih di anggarkan kembali lebih matang-matang oleh BKM, karena minimnya dana bantuan ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program PLPBK mengingat pembangunan infrastruktur prasarana lingkungan sangat banyak lingkungnya untuk di laksanakan penataan lingkungan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- 3) Perlu adanya peningkatan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dalam setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh pelaksana program yaitu kelompok swadaya masyarakat (KSM) Kelurahan Kedung Cowek.

Daftar Pustaka

Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : ALFABETA.
- Arikunto dan Jabar. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Achmadi Abu dan Narbuko Cholid. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. 2003. *Rencana Induk Program Pengendalian Urbanisasi dan Penanganan PMKS di Provinsi Jawa Timur*.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1990. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Harapan*. Jakarta: LP3ES.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Kebijakan Publik: edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Erwan dan Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Giva Media.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hessel Nogi S Tangkilisan. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Harbani Pasolong. *Teori Administrasi Publik*. 2010. Bandung: Alfabeta.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press (GP Press).
- Kisdarto Atmosoeparto. 2000. *Menuju SDM Berdaya: Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Michael Quinn Patton. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Er-Ruzz Media.
- Romdiati at, al. 2004. *Migrasi Dan Permukiman Kumuh di Surabaya*. Jakarta: PPK- LIPI.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik"*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sri, Kurnasih. *Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh di Petukangan Utara Jakarta Selatan*. *Ibid*.

- Solichin Abdul Wahab. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriyanto, Stefanus dan Anita Damayanti, Nyoman. *Perencanaan Dan Evaluasi*. 2007. Surabaya: Airlangga Univercity.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Triana, Rochyati Wahyuni. 2011. *Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Winarno. Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Meida
- Yeremias T Keban. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*. Yogyakarta: Gava Media.

Dokumen:

- Dokumen Lokasi Kawasan Daerah Kumuh Di Surabaya Oleh Bappeko Kota Surabaya Tahun 2008
- Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/143/436.1.2/2015 Tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman di Kota Surabaya
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
- Kepmen PU No. 441/KPTS/1998, Kepmen PU No. 468/KPTS/1988, dan Kepmen Kimpraswil No.403/KPTS/M/2002.

Skripsi:

- Ike, Andini. 2014. *Pemerintah Kota dan Perbaikan Daerah Kumuh*. Universitas Airlangga. Skripsi
- Intan Wijayanti. 2010. *Studi Deskriptif tentang Efektifitas Program Sertifikasi Guru di SMK Negeri 5*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
- Kusnia Ratih. 2012. *Resolusi Konflik Berbasis Community Governance (Studi Deskriptif Kualitatif di Kawasan Pasar Klewer)*. Skripsi. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Jurnal:

- Armstrong A F & Francis R D. 2005. *The Concept of Community Governance: A Preliminary Review*. Journal. Victorya University.
- Bowles Samuel and Gintis Herbert. 2002. Social Capital and Community Governance. The economic journal. Volume 112 No. 483

Internet:

- <https://akatiga.org/index.php/artikeldanopini/institusi/69-antarapendudukkota>, diakses pada 25 Januari 2018
- <https://amp.kompas.com/properti/read/2016/11/07/210000421/Urbanisasi-di-Indonesia-Hanya-Bikin-Penduduk-Makin-Miskin>, diakses pada 25 Januari 2018
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3636610/ini-syarat-jika-ingin-menetap-di-kota-surabaya> diakses pada 28 Januari 2018
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3378353/jumlah-penduduk-surabaya-makin-gemuk> diakses pada 28 Januari 2018
- <https://jatim.bps.go.id/statictable/2016/04/29/330/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2010-2014-dan-2015.html> diakses pada tanggal 04 Juli 2018
- <http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2016/173907-Pertumbuhan-Penduduk-di-Surabaya-Sampai-80-Ribu-Orang-per-Tahun> diakses pada 28 Januari 2018
- https://www.kompasiana.com/keziarene/fenomena-permukiman-padat-penduduk-di-surabaya_54f91c2ea33311b6078b4655 diakses pada 2 Februari 2018
- <https://mehafia.wordpress.com/permasalahan-3/> diakses pada 28 Januari 2018
- <http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=7422&catid=2&> diakses pada 3 Februari 2018
- <http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-teori.html> diakses pada 15 Februari 2018
- http://www.academia.edu/11950278/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2.1_Permukiman_Kumuh_2.1.1_Pengertian_Permukiman_Kumuh diakses pada 28 Februari 2018